

Papua dan Perisakan Digital

Oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D

Kata perisakan atau perudungan digital (*cyber bullying*) kembali mencuat. Hanya karena ulah oknum yang rasis, Papua yang semula tenang tersulut kobaran api amarah. Soalnya sepele, tapi kemudian membunchah dan menyulut api emosi saudara kita di sebagian bumi Cendrawasih tanpa kendali.

Peristiwa Kalasan (PS) Surabaya, dimana asrama mahasiswa Papua beralamat seolah menjadi pemantiknya. Entah benar, entah salah tak banyak yang tahu. Pagi itu, ditemukan tiang dan bendera merah putih terbuang di selokan. Alibi, oknum anggota ormas langsung semburat dan menuduh itu pasti ulah mahasiswa Papua yang tinggal di situ. Tak urung emosipun meletup. Dan berbuntut pengamanan 43 mahasiswa Papua oleh Polisi. Geger Kalasan menjadi merantak di bumi Papua. Bahkan seruan dari Gubernur Lukas Enembe untuk pulang kampung membuat panas kuping anak muda yang sedang belajar di berbagai kota di Indonesia. Tanpa kejelasan informasi tujuh ratusan mahasiswa Papua benar-benar terprovokasi dan pulang kampung. Entah bagaimana nasibnya sekarang.

Ada tokoh yang menanggung keuntungan. Ada pihak yang dirugikan. Delapan orang menjadi korban. Meredakan laju info yang tidak jelas, Pemerintah langsung melambatkan akses internet di Papua. Informasi mana yang benar berdasarkan fakta, kembali gelap. Tujuannya mencegah eskalasi berita hoaks. Sebab terdeteksi ada 300 ribu laman menyebarkan berita bohong dan 1700 akun medsos menyebarkan konten provokasi. Papua seolah pulau yang terisolasi informasi. Inilah dampak perisakan digital yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Berita bohong teramplifikasi oleh media sosial, rakyat yang tidak tahu apa-apa menderita kerugian.

Pembiaran Perudungan

Mahasiswa Papua di Asrama Kalasan Surabaya, bisa jadi korban kesekian perudungan yang disengaja. Belum ada bukti sah, mereka sudah dikepung. Seolah sekawan hewan yang sedang sial nasibnya. Analogi tragedi Papua yang menyesak, ditemukan pada Kekristenan yang juga terus mengalami hal yang sama. Perudungan demi perudungan silih berganti berdatangan. Anehnya Negara tidak begitu ambil peduli, bila ada penistaan terhadap simbol Kekristenan. Misalnya, salib begitu masifnya disiarkan berulang-ulang sebagai simbol jin kafir dan diendorse ulama muslim terkenal. Begitu juga tuduhan Alkitab yang sudah dipalsukan, Yesus digambarkan cabul, Alkitab penuh pornografi dan lain-lain. Kesan yang tertangkap, isu sensitif itu dibiarkan berlalu. Negara melambaikan tangan tanpa tindakan pembelaan.

Harus diakui, apologetika Kristiani ketika menerima perudungan sangat lemah memberi pembelaan. Sering yang diumbar adalah kata-kata, ya Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat (Luk.23;34). Bisa jadi ini ekspresi ketidakberdayaan umat Kristen menghadapi kekuatan dominan atau bentuk penyerahan total bahwa semua persoalan akan dituntaskan oleh sang Parakletos. Persembunyian aman yang sering dijadikan bilik berlindung adalah Tuhan tidak perlu dibela. Seratus bahkan 1000 persen itu benar, tatkala laga sudah membabi buta tanpa kendali.

Tapi satu hal yang harus tetap dicamkan warta sukacita itu harus diberitakan. Pemberitaan bisa beragam cara, termasuk forum perdebatan dan dialog antar iman. Mengapa? Karena iman Kristen adalah iman yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, teologis dan substantif. Jujur saya turut kurang sreg ketika ada berita pembatalan perdebatan Pendeta Esra Alfred Soru dengan muallaf Yahya Waloni, yang rencana digelar oleh Yayasan

Abdulah Wasian di Universitas Muhamddiyah Sidoarjo, 26 Oktober 2019. Apapun alasannya pada tataran praksis keberanian pendeta atau teolog Kristiani berjumpa dalam forum perdebatan ilmiah adalah penting untuk membangun perjumpaan kesepahaman. Sekaligus mekanisme pencerahan atas disinformasi yang sengaja dibangun untuk melawan gelombang penyesatan. Sebuah cara yang sejak era pemazmur hiduppun sudah terjadi. Seperti tertulis: "Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi TUHAN adalah tempat perlindungannya." (Mzm.14:6).

Fakta ini tidak bisa dibiarkan dan didiamkan. Terlebih Indonesia adalah rumah besar agama-agama yang secara konstitusi harus dilindungi secara adil. Persis ketika orang Papua tidak melakukan reaksi perlawanan mungkin perhatian lebih ke mereka juga tidak ada. Malah bisa jadi mahasiswa Papua di tempat lain akan dijadikan bulan-bulanan dan bahan perudungan. Seperti yang terjadi di Bandung, mahasiswa Papua dihadahi satu kardus minuman keras untuk mabuk-mabukan.

Hak hidup agama-agama di bumi Pancasila sama semua. Jika belum sama harus disuarakan. Bahkan jika ada yang mengatakan Kafir dan Jahil, sejatinya umat Kristiani juga punya alasan untuk melaporkan ke aparat. Ini yang tertulis di Injil Matius 5: 22 yang demikian: "Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala."

Konteks boleh berbeda. Tetapi satu hal yang harus diingat menghadapi beragam perudungan, perisakan atau pelecehan di darat, udara, air dan alam maya, umat Kristen tidak boleh kendur. Jika atas nama Konstitusi 1945, Negara masih tetap belum adil dan masih berpihak yakin dan percayalah sang Parakletos yakni Tuhan Yesus Kristus tetap akan memelihara dan melindungi umat-Nya.

***Gatut Priowidodo, Ph.D** Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.